

Analisis Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Boalemo

Zulaiha Kadjintuni¹, Deysi Tontik², Darman^{3*}, Azis Rachman⁴, Titin Dunggio⁵

^{1,2} Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Administrasi, Universitas Bina Taruna Gorontalo, Indonesia

^{3,4,5} Program Studi Magister Ilmu Administrasi, Universitas Bina Taruna Gorontalo, Indonesia

Article Info

Article history:

Received : 13 November 2022

Publish : 7 Januari 2023

Keywords:

Pengelolaan
Perencanaan
Pelaksanaan
Pelaporan
Kinerja
Akuntabilitas

Abstract

This research was conducted to analyze the role of regional financial management including budget planning, budget execution, budget reporting/accountability and evaluation of performance accountability of the local government of Boalemo Regency. This research method uses quantitative research with an observation process. The results of the study show that budget planning, budget execution, budget accountability and budget evaluation have a significant effect on the performance accountability of the Boalemo District Government. In terms of financial management, especially in terms of budget planning to focus more on budgets that support the agreed program and performance targets.

Info Artikel

Article history:

Received : 13 November 2022

Publish : 7 Januari 2023

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis peran pengelolaan keuangan daerah meliputi perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, pelaporan/pertanggung jawaban anggaran dan evaluasi terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah daerah Kabupaten Boalemo. Metode penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif dengan proses observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, pertanggung jawaban anggaran dan evaluasi anggaran berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Boalemo. Dalam hal pengelolaan keuangan terutama dalam hal perencanaan anggaran agar lebih memfokuskan pada anggaran-anggaran yang menunjang program dan target kinerja yang telah diperjanjikan.

This is an open access article under the [Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)



Corresponding Author:

Darman

Universitas Bina Taruna Gorontalo

Email: darman@ubmg.ac.id

1. PENDAHULUAN

Dalam masa otonomi dikala ini sangat dibutuhkan sesuatu manajemen pengelolaan finansial wilayah yang sanggup menjadi sesuatu penting khusus untuk pemegang kewenangan pemerintahan wilayah. Pemulihan manajemen pengelolaan finansial wilayah jadi tanggungjawab pemerintahan daerah.

Tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan agenda pokok yang perlu diperhatikan oleh pemerintah daerah. Salah satu dari agenda-agenda utama dalam reformasi administrasi dan manajemen publik menurut Berry, 2009 yakni akuntabilitas. Menurutnya salah satu nilai sentral bagi pemerintahan yang demokratis adalah akuntabilitas. Akuntabilitas dapat

diwujudkan dengan berbagai bentuk. Diantaranya yakni *Pertama*, akuntabilitas keuangan melalui audit keuangan. Dimana uang dibelanjakan? Apakah dibelanjakan secara legal dan sesuai hukum? *Kedua*, akuntabilitas untuk keadilan. Apakah pemerintah dioperasikan sehingga karyawan, kontraktor, dan warganya diperlakukan secara adil? Banyak aturan dan prosedur kita dibuat untuk memastikan keadilan dan kesetaraan dijunjung tinggi dalam program-program pemerintah. *Ketiga*, akuntabilitas penggunaan kekuasaan. Banyak dari undang-undang kita tentang etika, penggunaan dana pemerintah yang tepat, dan praktik perekrutan berkaitan dengan mencegah pejabat menyalahgunakan kekuasaan mereka. Dan terakhir *keempat* akuntabilitas kinerja. Ini adalah jantung dari dua decade terakhir reformasi administrasi. Akuntabilitas kinerja berfokus pada apa yang dilakukan oleh pemerintah, dan seberapa baik pemerintah mencapai tujuannya.

Sejak bergulirnya reformasi birokrasi, pemerintah banyak melaksanakan penyempurnaan dalam perihal manajemen pengelolaan finansial wilayah cocok dengan hal serta kelompok alat wilayah. Antara lain kebijaksanaan terpaut pengelolaan finansial wilayah yang di atur melewati Peraturan Penguasa No 12 tahun 2019 mengenai pengelolaan finansial daerah yang setelah itu di jabarkan dengan peraturan eksekutif ialah peraturan Menteri Dalam Negara No 77 tahun 2020 mengenai Prinsip Teknis Pengelolaan Finansial Wilayah. Paradigma terkini berbentuk desakan buat melaksanakan pengelolaan yang mengarah pada kebutuhan khalayak. Perihal ini mencakup desakan kepada penguasa wilayah buat membuat informasi finansial serta kejernihan perhitungan pada khalayak guna mencapai target kinerja.

Permasalahan yang sering terjadi di dalam organisasi pemerintah saat ini diantaranya dalam hal pengambilan keputusan dalam proses pengelolaan keuangan yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pengevaluasian dalam penggunaan anggaran. Dilain pihak tujuan dari pemerintah daerah penganggaran yang berbasis kinerja, efisien, efektif dan akuntabel. Juga menjadi masalah yang sering terjadi terdapatnya pandangan aparatatur penguasa kalau skala kesuksesan serta kekalahan dalam melaksanakan kewajiban utama serta gunanya cuma bertumpu pada daya lembaga dalam meresap perhitungan yang di alokasikan, ialah kesuksesan lembaga cuma dipusatkan pada pandangan input tanpa memandang output ataupun akibatnya yang mungkin tengah jauh dari standar (BPKP, 2000). Sementara itu untuk sanggup mengenali kesuksesan ataupun kekalahan kelompok semua kegiatan kelompok wajib bisa diukur serta penanda pengukuran tidak cuma bersumber pada input namun pula bersumber pada keluaran ataupun guna dari sesuatu program atau aktivitas.

Penganggaran berlandaskan kemampuan ialah sesuatu pendekatan analitis dalam kategorisasi perhitungan yang menyangkutkan pengeluaran yang dicoba kelompok zona khalayak dengan kemampuan yang dihasilkannya dengan memakai data kemampuan. Bagi Bastian (2010) kalau Perhitungan mengarah Kemampuan (*Performance Budgeting*) ialah sistem penganggaran yang mengarah pada output kelompok serta berhubungan amat akrab dengan visi, tujuan serta konsep penting kelompok. Perhitungan yang tidak efisien serta tidak mengarah pada kemampuan hendak bisa membatalkan pemograman yang sudah disusun sehingga akan mempengaruhi hasil akuntabilitas kinerja.

Anggaran dengan pendekatan kemampuan menekankan rancangan *value for money* serta pengawasan atas kemampuan output (Mardiasmo 2009). Kategorisasi perhitungan berplatform kemampuan bermaksud buat bisa menaikkan kemampuan pembagian basis energi serta daya guna penggunaannya cocok dengan pemograman yang sudah diresmikan oleh penguasa wilayah alhasil dengan terdapatnya perhitungan berplatform kemampuan itu diharapkan perhitungan bisa dipakai dengan cara maksimal buat menaikkan keselamatan warga serta bisa mensupport kenaikan transparansi serta akuntabilitas manajemen zona khalayak (Haspiarti, 2012). Aplikasi penganggaran berplatform kemampuan mempengaruhi kepada akuntabilitas kemampuan lembaga penguasa yang terukur melewati jenjang daur perhitungan cocok dengan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan finansial wilayah ialah, diawali dari pemograman perhitungan,

penerapan perhitungan, peliputan atau pertanggungjawaban serta evaluasinya wajib betul- betul bisa dipertanggungjawabkan pada warga (Haspiarti, 2012).

Dalam hal pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran unit organisasi berkewajiban menyampaikan laporan keuangan dan laporan kinerja begitu juga sudah diatur dengan Peraturan negara No 8 tahun tahun 2006 Peliputan finansial serta kemampuan lembaga negara. Perihal ini dibesarkan lagi dengan melewati implementasi sistem akuntabilitas lembaga penguasa yang diatur melewati Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

SAKIP itu dipakai guna mengenali berhasil ataupun tidaknya lembaga penguasa dalam mencapai visi serta tujuan kelompok. APBD di Kabupaten Boalemo sudah dicocokkan dengan ketentuan yang legal dengan sistem penganggaran kemampuan Peraturan Rezim hal pengelolaan keuangann wilayah, alhasil perhitungan penguasa diharapkan sanggup terealisasi sesuai misi serta target yang mau dicapai.

Laporan akuntabilitas pemerintah kabupaten Boalemo kurun waktu 3 tahun terakhir dapat disajikan pada tabel 1 sebagai berikut :

No	Komponen yang dinilai	Bobot (%)	Nilai		
			2019	2020	2021
a.	Perencanaan Kinerja	30	21,21	21,74	21,95
b.	Pengukuran Kinerja	25	14,44	15,08	15,21
c.	Pelaporan Kinerja	15	10,24	10,53	9,57
d.	Evaluasi Internal	10	5,71	5,82	6,06
e.	Capaian Kinerja	20	10,86	10,14	9,079
	Nilai hasil Evaluasi	100	61,86	63,31	62,58
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		B	B	B

Sumber : Bagian Organisasi Kabupaten Boalemo

Berdasarkan tabel diatas diatas, dapat dilihat tingkat akuntabilitas kinerja dalam kurun waktu tiga tahun, di beberapa komponen penilaian mengalami peningkatan namun di beberapa komponen lainnya mengalami penurunan.. Sehingga pada penelitian ini mencoba melakukan analisis manajemen pengelolaan keuangan terhadap kinerja yang akan dicapai. Berdasarkan latar belakang, penelitian ini mencoba menganalisa sejauh mana pengaruh pengelolaan keuangan terhadap akuntabilitas kemampuan, yang diamati dari bidang pemograman perhitungan, penerapan perhitungan, peliputan atau pertanggung balasan serta penilaian kemampuan.

2. KAJIAN PUSTAKA

Manajemen Pengelolaan Keuangan

Dengan cara garis besar, penafsiran manajemen finansial bagi para pakar ekonomi pada dasarnya merujuk pada strategi *Planning, Organizing, Actuating* serta *Controlling* (POAC) finansial dalam suatu kelompok, industri ataupun instansi.

Menurut Wikipedia manajemen finansial berarti selaku suatu kegiatan merancang, menganggarkan, memeriksa, mengatur, mengendalikan mencari serta menaruh anggaran yang terdapat dalam kelompok ataupun industri. Sudana (2011: 1) mendefinisikan manajemen finansial selaku salah satu aspek manajemen fungsional yang mempraktikkan prinsip- prinsip finansial dalam pengumpulan ketetapan pemodalan waktu jauh sampai pengelolaan modal kegiatan industri dalam pemodalan ataupun pendanaan waktu pendek.

Suad Husnan & Enny Pudjiastuti (1998: 4) menerangkan kalau Manajemen Finansial ialah aktivitas kelompok dalam menata finansial yang menyangkut semacam pemograman, analisis serta pengaturan aktivitas finansial. Sebaliknya yang diartikan dengan penafsiran pengelolaan finansial wilayah pada Peraturan Menteri dalam Negara no 77 tahun 2020 mengenai pengelolaan keunagan wilayah merupakan totalitas aktivitas yang mencakup pemograman, penganggaran, penerapan, penatausahaan, pelaporaan serta pertanggung balasan serta pengawasan finansial wilayah

Kinerja dan Pengukuran Kinerja

Kinerja adalah cerminan hal tingkatan pendapatan penerapan sesuatu aktivitas, program kebijaksanaan dalam menciptakan target, misi, tujuan serta visi kelompok (LAN- RI. 1993: 3). Rancangan kemampuan yang dikemukakan oleh LAN-RI lebih memusatkan pada referensi kemampuan sesuatu kelompok public yang lumayan relepan cocok dengan strategi sesuatu kelompok ialah dengan tujuan serta visi yang lain yang mau dicapai.

Selanjutnya menurut Prawirosentono (1992: 2), berkata kemampuan merupakan hasil kegiatan yang bisa dicapai oleh karyawan ataupun segerombol karyawan dalam sesuatu kelompok, cocok dengan dengan wewenang serta tanggung jawab tiap- tiap, dalam usaha menggapai misi kelompok berhubungan dengan cara sah, tidak melanggar hukum serta cocok dengan akhlak serta etika.

Untuk mengenali kemampuan kelompok sehingga tiap kelompok wajib mempunyai patokan kesuksesan berbentuk target- target khusus yang akan dicapai, dimana tingkatan pendapatan atas sasaran itu didasarkan pada sesuatu rancangan khusus yang telah terjamin validatasnya dalam melaksanakan pengukuran kemampuan sesuatu kelompok. Menurut Robertson dalam Mahmudi (2010), pengukuran kemampuan didefinisikan selaku sesuatu cara evaluasi perkembangan profesi kepada misi serta target yang sudah ditetapkan sebelumnya, tercantum data atas kemampuan, pemakaian basis energi dalam membuahkan benda serta pelayanan, mutu benda serta pelayanan, analogi hasil aktivitas dengan sasaran serta efektifitas aksi dalam menggapai misi. Sedangkan bagi Lohman (2003) pengukuran kemampuan ialah sesuatu kegiatan evaluasi pendapatan target- target khusus yang di bentukan dari misi penting kelompok. Sebagian opini pula melaporkan kalau pengukuran kemampuan ialah sesuatu perlengkapan manajemen yang dipakai buat menaikkan mutu pengumpulan ketetapan serta akuntabilitas dalam kelompok (Whittakker serta Simons) dalam BPKP, (2000).

Bersumber pada deskripsi diatas, sehingga dapat ditarik kesimpulan yaitu pengukuran kemampuan merupakan selaku sesuatu cara ataupun perlengkapan yang dipakai dalam memperhitungkan pendapatan penerapan aktivitas bersumber pada konsep penting alhasil bisa dikenal perkembangan kelompok dan buat menaikkan mutu pengumpulan ketetapan serta akuntabilitas. Jadi pada pengukuran kemampuan pada dasarnya dipakai buat evaluasi atas kesuksesan ataupun kekalahan penerapan aktivitas, program, serta atau ataupun kebijaksanaan cocok dengan target serta misi yang sudah diresmikan dalam bagan menciptakan tujuan serta visi lembaga penguasa. Pengukuran kemampuan melingkupi penentuan penanda kemampuan serta penentuan capaian penanda kemampuan.

Akuntabilitas

Bersumber pada deskripsi diatas, sehingga dapat ditarik kesimpulan yaitu pengukuran kemampuan merupakan selaku sesuatu cara ataupun perlengkapan yang dipakai dalam memperhitungkan pendapatan penerapan aktivitas bersumber pada konsep penting alhasil bisa dikenal perkembangan kelompok dan buat menaikkan mutu pengumpulan ketetapan serta akuntabilitas. Jadi pada pengukuran kemampuan pada dasarnya dipakai buat evaluasi atas kesuksesan ataupun kekalahan penerapan aktivitas, program, serta atau ataupun kebijaksanaan cocok dengan target serta misi yang sudah diresmikan dalam bagan menciptakan tujuan serta visi lembaga penguasa. Pengukuran kemampuan melingkupi penentuan penanda kemampuan serta penentuan capaian penanda kemampuan.

J. B. Gahatrtey Akuntabilitas ialah sesuatu yang tertuju buat mencari balasan kepada persoalan yang berhubungan dengan apa? Siapa. pada siapa? Yang mana, serta gimana. Bagi Mahmudi akuntabilitas dalam instansi khalayak dibagi jadi 5 bagian antara lain merupakan:

a. Akuntabilitas hukum dan kejujuran

Ialah pertanggung yang berkaitan dengan kegiatan penguatan hukum serta pula aturan kejujuran yang ditunjukkan dengan tidak melaksanakan bermacam macam penyalah gunaan

kewenangan serta wewenang yang dipunyai.

b. Akuntabilitas manajerial

Ialah pertanggungjawaban yang berhubungan dengan pola kegiatan administratif yang wajib dilaksanakan dengan efisien serta pula efiseien.

c. Akuntabilitas program

Ialah pertanggungjawaban yang berhubungan dengan tiap program yang hendak dijalani. Orang yang berhak dalam program ini wajib bisa membuktikan bila program yang hendak dibentuk bisa berjalan dengan bagus ataupun tidak, serta apa saja usaha yang bisa dicoba supaya program itu bisa berjalan lancar dengan bagus serta maksimal.

d. Akuntabilitas kebijakan

Ialah pertanggung balasan yang berkaitan dengan instansi public kepada bermacam berbagai kebijaksanaan serta ketetapan yang sudah diputuskan atau didapat.

e. Akuntabilitas finansial

Ialah berkaitan akrab dengan pertanggungjawaban instansi public kepada tiap uang yang disetorkan oleh warga pada rezim. Instansi public wajib bisa menerangkan gimana uang itu diperoleh, kemana uang dibelanjakan serta bermacam berbagai pertanggungjawaban.

3. METODE PENELITIAN

Studi ini memakai prosedur penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian deskriptif kuantitatif ialah salah satu tipe riset yang tercantum dalam tipe studi kuantitatif. Dimana tujuan dari bentuk penelitian ini merupakan untuk mengatakan kejadian ataupun kenyataan, kondisi, kejadian, variabel serta keadaan yang terjalin dikala penelitian berjalan dengan mempertunjukkan apa yang sebenarnya terjalin.

Menurut Nazir (1988), cara deskriptif ialah sesuatu cara dalam mempelajari status sekelompok orang, suatu subjek, sesuatu set situasi, sesuatu system pandangan atau sesuatu kategori insiden pada era saat ini.

Posisi penelitian di jalani pada Penguasa Kabupaten Boalemo yang mencakup faktor pelaksana pemerintahan daerah baik dari faktor pemograman serta finansial. Sumber informasi dalam studi ini berasal dari informasi pokok serta inferior. Metode pengumpulan informasi dicoba melewati cara pemilihan, tanya jawab serta pemantauan.

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten Boalemo mempunyai perangkat wilayah yang terdiri dari Sekretraiat Wilayah yang ialah faktor karyawan, Kepaniteraan DPRD ialah unsur jasa administrasi serta pemberian support pada kewajiban serta fungsi DPRD, Inspektorat Daerah ialah faktor pengawas pelaksana penguasa daerah, dinas selaku faktor eksekutif teknis hal pemerintahan yang jadi wewenang wilayah kabupaten serta badan yang ialah faktor penunjang penerapan hal pemerintahan. Perangkat wilayah Kabupaten Boalemo dibangun melewati Peraturan Wilayah No 5 Tahun 2016 mengenai Susunan serta Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Boalemo.

Penyusunan anggaran dan belanja daerah (APBD) Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo tahun dilakukan serta diformulasikan melewati pendekatan perhitungan berbasis kemampuan. Pendekatan ini ditunjukkan serta bermaksud untuk dapat menampung harapan serta penuhi semua keinginan warga selaku penerima manfaat dari tiap program pembangunan dengan cara maksimal. Akan tetapi demikian, agar terdapat jaminan jika dalam penerapan perhitungan dicoba dengan cara berdaya guna, efisien, dan akuntabel dapat di lihat dari analisis capaian kinerja pemerintah kabupaten Boalemo.

4.1 Rencana Kinerja dan Anggaran

Proses perencanaan pemerintah Kabupaten Boalemo dalam kurun waktu tertentu dituangkan dalam dokumen Rencana Strategis yang berisi visi, tujuan misi target serta strategi yang dilaksanakan melewati kebijaksanaan serta program kepala wilayah. Pemograman startegis dengan mencermati misi serta target yang dinergikan dengan visi serta tujuan, ialah tahap dini yang wajib dicoba oleh penguasa Kabupaten Boalemo supaya sanggup menanggapi desakan area penting, positif local, nasional ataupun garis besar serta konsisten ada dalam aturan system administrasi Negeri kesatuan Republik Indonesia. Dengan pendekatan pemograman penting yang nyata serta sinergis, penguasa Kabupaten Boalemo lebih bisa memadankan visi serta misinya dengan kemampuan, kesempatan, serta hambatan yang dihadapi dalam usaha kenaikan akuntabilitas kinerjanya.

Pemerintah Kabupaten Boalemo dalam dalam melaksanakan kinerja pemerintah setiap tahunnya pada awal tahun menetapkan perjanjian kinerja, hal ini untuk menciptakan pendapatan tujuan dengan cara terukur yang sudah diresmikan dalam RPJMD tahun 2017- 2022. Pada tahun 2021 penguasa Kabupaten Boalemo mempunyai 13(tiga belas) target penting dengan 29(dua puluh Sembilan penanda kemampuan(out comes). kontrak kinerja penguasa Kabupaten Boalemo Tahun 2021 merujuk pada surat ketetapan Bupati Boalemo No: 22 Tahun 2020 mengenai Pergantian atas Peraturan Bupati No 41 Tahun 2018 mengenai Penanda Kemampuan Penting Kabupaten Boalemo Tahun 2017- 2022, Akta Konsep Kegiatan Penguasa Wilayah (RKPD) Pergantian Tahun 2021, serta Akta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pergantian Tahun 2021. Dalam melakukan program serta aktivitas buat mewujudkan sasaran kemampuan yang mau digapai Penguasa Kabupaten Boalemo perhitungan dialokasikan sebesar Rp. 835.754.869.746. Dari alokasi anggaran tersebut dalam membiayai program-program prioritas yang langsung mendukung pencapaian sasaran pembangunan sebesar Rp. 349.301.942.823,00. Alokasi anggaran dapat digambarkan melalui tabel berikut :

Tabel 1. Alokasi anggaran Berdasarkan sasaran Strategis Tahun 2021

NO	SASARAN STRATEGIS	ANGGARAN (Rp)	%
1.1.1	Meningginya Keamanan, Kedisiplinan Biasa, Ketentraman serta Proteksi Hukum kepada Warga	1.060.714.615,00	0,30
1.2.1	Meningginya aturan kelola Pemerintahan daerah yang bagus serta bersih, diiringi aplikasi e- government yang terintegrasi dalam membagikan Pelayanan untuk warga	149.041.487.896,00	42,67
1.3.1	Meningginya bagian Kesehatan masyarakat	54.594.638.530,00	15,63
1.3.2	Terwujudnya area perumahan, kawasan tinggal yang sehat	31.128.457.196,00	8,91
1.3.3	Meningginya mutu prasarana dasar	36.689.249.713,00	10,50
2.1.1	Meningginya Mutu Pendidikan	67.646.413.061,00	19,37
3.1.1	Terbinanya Pemberdayaan UMKM	949.924.000,00	0,27
3.1.2	Menaikkan Pemasukan serta energi beli warga Orang tani serta Nelayan	567.242.000,00	0,16
3.1.3	Menyusutnya Nilai kemiskinan	673.514.350,00	0,19
3.2.1	Meningginya Energi Ungkit Terkini Zona Pariwisata	355.985.750,00	0,10

3.3.1	Meningginya Laju Perkembangan Ekonomi Zona Unggulan	5.100.000,00	0,00
4.1.1	Meningginya kegiatan Peribadatan	4.583.339.712,00	1,31
4.1.2	Meningginya mutu Pendidikan Agama dengan Sistem Non Resmi yang berlandaskan warga	2.005.876.000,00	0,57
JUMLAH		349.301.942.823,00	100

4.2 Capaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Boalemo

Dalam menggapai misi serta target yang sudah diresmikan dalam RPJMD tahun 2017-2022 serta akad kemampuan tahun 2021 penguasa kabupaten Boalemo sudah melakukan program serta aktivitas cocok dengan misi serta target. Selanjutnya bagan capaian kemampuan pemetintah Kabupaten boalemo tahun 2021:

Tabel 2 Capaian Kinerja Pemerintah kabupaten Boalemo Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	No	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja		
					Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Menjadi meningkat Keamanan, Kedisiplinan Biasa, Ketentraman serta Perlindungan Hukum terhadap Masyarakat	1.1	Presentase Penurunan Gangguan Kantibmas	%	60	100	166,67
		1.2	Persentase Permasalahan Hukum yang terselesaikan	%	90	50	55,56
2	Meningginya aturan kelola Pemerintahan wilayah yang bagus serta bersih, diiringi aplikasi e- government yang terintegrasi dalam membagikan Jasa untuk warga	2.1	Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai	Sangat Tinggi	n/a	n/a
		2.2	Nilai/predikat Akuntabilitas Kinerja	Nilai	B	n/a	n/a
		2.3	Maturitas SPIP	Nilai	3	n/a	n/a
		2.4	Persentase OPD yang menerapkan teknologi informasi	%	90	98	108,89
		2.5	Opini/Predikat Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Nilai	WTP	n/a	n/a
		2.6	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai	68	n/a	n/a
		2.7	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Skala	3,8	3,9	102,63
3	Meningkatnya derajat Kesehatan masyarakat	3.1	Umur Harapan Hidup	Tahun	69	69,30	100,43
		3.2	Angka Kematian Ibu Melahirkan (/100.000 KH)	%	161	243,8	66,04
		3.3	Angka Kematian Bayi (/1.000 KH)	%	8,5	9,75	887,1818
		3.4	Prevalensi kekurangan Vitamin pada anak bayi	%	0,15	0,5	30

4	Terwujudnya area perumahan, kawasan tinggal yang kondusif	4.1	Persentase Area Perumahan yang kondusif di dengan dukungan PSU	%	70	70	100
		4.2	Persentase Rumah Tidak cukup ditempati yang semakin Menyusut	%	0,60	0,60	100
5	Meningkatnya kualitas infrastruktur dasar	5.1	Persentase Jembatan dalam Situasi Bagus	%	52	77,04	148,15
		5.2	Persentase Jalur Kabupaten dalam Situasi Bagus (lebih dari 40 Kilometer Per Jam)	%	60	40,9	68,17
		5.3	Cakupan Luas Areal Sawah yang bisa dialiri	%	77,5	98,15	126,65
6	Meningkatnya Kualitas Pendidikan	6.1	Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)	Angka	9,5	7	74
		6.2	Persentase Kelulusan	%	100	100	100
7	Terbinanya Pemberdayaan UMKM	7.1	Persentase peningkatan omzet UMKM	%	65	65	100
8	Meningkatkan Pendapatan dan daya beli masyarakat Petani dan Nelayan	8.1	Nilai Tukar Petani (NTP)	%	107	106,67	99,69
		8.2	Nilai Tukar Nelayan (NTN)	%	108,78	96,92	89,10
9	Menurunnya Angka kemiskinan	9.1	Persentase Angka Kemiskinan	%	20,11	19	94,48
10	Meningkatnya Daya Ungkit Baru Sektor Pariwisata	10.1	Jumlah Kunjungan Wisatawan	Wisata wan	300.00 0	73.396	24,47
11	Meningkatnya Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan	11.1	Pertumbuhan Ekonomi	%	6,69	2,03	30,34
12	Meningginya kegiatan Ritual	12.1	Persentase Alat Ritual yang sejahtera	%	90	50	55,56
13	Meningginya mutu Pendidikan Agama dengan Sistem Non Resmi yang berlandaskan oleh warga	13.1	Persentase Peserta didik Tingkatan SD serta Menengah yang sadar Huruf Al- Quran	%	75	99,9	133,20
		13.2	Jumlah Santri	Santri	7.000	3785	54,07

Sumber : LAKIP Kabupaten Boalemo tahun 2021

Bersumber pada hasil pengukuran penanda kemampuan target diatas bisa di gambarkan pendapatan penanda kemampuan target penting penguasa Kabupaten Boalemo tahun 2021, sebagaimana diagram serta bagan selaku selanjutnya:



Sumber : LAKIP Kabupaten Boalemo tahun 2021

4.3 Akuntabilitas Keuangan

Dalam menggapai misi serta target yang sudah diresmikan, Penguasa Kabupaten Boalemo dibantu oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Ada pula realisasi Pemasukan Wilayah ialah 97, 40 Persen serta Berbelanja Wilayah 91, 28 Persen. Realisasi Perhitungan Pemasukan serta Berbelanja Wilayah Tahun 2021 bisa diamati pada bagan dibawah ini :

Tabel 2. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Bekanja daerah **Pemerintah Kabupaten Boalemo Tahun 2021**

NO	URAIAN	TAHUN ANGGARAN 2021			
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	REALISASI (Rp)	%
4	PENDAPATAN DAERAH	835.754.869.746,00	825.056.087.490,04	803.565.553.944,73	97,40
4.1	Pendapatan Asli Daerah	59.517.167.965,00	54.057.606.538,04	54.699.510.321,26	101,19
4.2	Pendapatan Transfer	757.388.708.000,00	746.678.180.952,00	725.065.319.816,00	97,11
4.5	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	18.848.993.781,00	24.320.300.000,00	23.800.723.807,47	97,86
5	BELANJA DAERAH	843.985.669.746,00	860.891.001.331,65	785.779.633.792,70	91,28
5.1	Belanja Operasi	558.372.068.077,00	574.115.757.149,65	534.706.276.255,70	93,14
5.2	Belanja Modal	147.069.433.065,00	147.614.921.674,00	115.107.018.533,00	77,98
5.3	Belanja Tidak Terduga	1.000.000.000,00	3.011.893.604,00	0,00	0,00
5.4	Belanja Tranfer	137.544.168.604,00	136.148.428.904,00	135.966.339.004,00	99,87
	SURPLUS / (DEFISIT)	8.230.800.000,00	35.834.913.841,61	17.785.920.152,03	49,63

Sumber : BPKAD Kab. Boalemo Tahun 2021

Ada pula pagu serta realisasi perhitungan yang terpaut langsung dengan pendapatan sasaran target serta Penanda Kemampuan Penting Kabupaten Boalemo yang diperjanjikan pada Tahun 2021 merupakan sebesar Rp. 349.301.942.823,-. Sedangkan realisasi perhitungan terpaut dengan pendapatan kemampuan target penting Penguasa Kabupaten Boalemo Tahun 2021 merupakan sebesar Rp. 303.158.244.697,- atau sebesar 86, 79 Persen, begitu juga dihidangkan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 3. Pagu dan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Boalemo Per Sasaran Strategis Tahun 2021

SASARAN STRATEGIS		RENCANA ANGGARAN	REALISASI	%
MISI I : MEWUJUDKAN KABUPATEN BOALEMO YANG DAMAI				
1.1.1	Meningginya Keamanan, Kedisiplinan normal, Ketentraman serta Proteksi Hukum kepada Warga	1.060.714.615,00	1.048.969.105,00	98,89

1.2.1	Meningginya aturan kelola Pemerintahan wilayah yang bagus serta bersih, diiringi aplikasi e-government yang terintegrasi dalam membagikan Jasa untuk warga	149.041.487.896,00	143.860.700.426,00	96,52
1.3.1	Meningginya bagian Kesehatan warga	54.594.638.530,00	42.902.385.858,00	78,58
1.3.2	Terwujudnya area perumahan, kawasan tinggal yang segar	31.128.457.196,00	24.021.455.923,00	77,17
1.3.3	Meningginya mutu prasarana bawah	36.689.249.713,00	19.821.451.367,00	54,03
MISI II : MEWUJUDKAN KABUPATEN BOALEMO YANG CERDAS				
2.1.1	Terjadi peningkatan mutu Pendidikan	67.646.413.061,00	63.796.998.687,00	94,31
MISI III : MEWUJUDKAN KABUPATEN BOALEMO YANG SEJAHTERA				
3.1.1	Terselenggara kegiatan UMKM	949.924.000,00	945.946.880,00	99,58
3.1.2	Terjadi peningkatan hasil dan nilai penjualan warga Petani serta Nelayan	567.424.700,00	560.874.700,00	98,88
3.1.3	Menurunnya Angka kemiskinan	673.514.350,00	651.745.059,00	96,77
3.2.1	Terjadi peningkatan sumber Ungkit Baru Sektor Pariwisata	355.985.750,00	194.905.200,00	54,75
3.3.1	Terjadi peningkatan angka tumbuhnya Ekonomi pada Sektor Unggulan	5.100.000,00	5.100.000,00	100
MISI IV : MEWUJUDKAN KABUPATEN BOALEMO YANG RELIGIUS				
4.1.1	Meningkatnya aktifitas Peribadatan	4.583.339.712,00	3.982.901.880,00	86,9
4.1.2	Meningkatnya kualitas Pendidikan Agama dengan Sistem Non Resmi yang berlandaskan warga	2.005.876.000,00	1.364.809.612,00	68,04

Sumber : LAKIP Kabupaten Boalemo Tahun 2021

Dari bagan diatas bisa dikenal perhitungan yang direncanakan serta digunakan buat pendapatan kemampuan target yang diperjanjikan Penguasa Kabupaten Boalemo pada Tahun 2021. Dari penjelasan diatas dapat digambarkan bahwa alokasi yang dianggarkan dalam menunjang program kegiatan berdasarkan program dan kegiatan pemerintah Kabupaten Boalemo kurang lebih sebesar 41%. Hal ini terjadi dikarenakan bahwa pendistribusian anggaran belum memprioritaskan program kegiatan yang menunjukkan pencapaian kinerja yang ditargetkan sehingga dapat mempengaruhi hasil akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Boalemo.

Berdasarkan hasil penilaian oleh Kemenpan- RB atas akuntabilitas kemampuan penguasa wilayah Kabupaten Boalemo membuktikan kalau tingkatan daya guna serta kemampuan pemakaian perhitungan dibanding dengan capaian kinerjanya, mutu pembangunan adat kemampuan birokrasi serta penyelenggaraan rezim yang mengarah pada hasil di Kabupaten Boalemo telah membuktikan hasil yang bagus. Tetapi sedang butuh dicoba sebagian koreksi antara lain program yang dilaksanakan baru hingga penerapan program serta pemasukan perhitungan, belum membidik pada hasil program serta aplikasi program itu sendiri, alhasil sedang ada ketidakselarasan antara aktivitas, hasil program serta kinerja yang dihasilkan.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembasan diatas dapat disimpulkan bahwa proses pengelolaan keuangan mempunyai kontribusi penting terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah kabupaten boalemo, terutama dalam hal perencanaan, pelaksanaan, dan pemanfaatan anggaran. Hal ini dapat dilihat

berdasarkan data-data yang telah di sampaikan diatas bahwa pentingnya pengalokasian anggaran pada program dan kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja yang ditargetkan.

Dalam hal pengelolaan keuangan terutama dalam perencanaan anggaran agar lebih memfokuskan pada anggaran-anggaran yang menunjang program dan target kinerja yang telah diperjanjikan. Peran dan fungsi dari pengelola keuangan dalam hal ini juga sangat penting dalam hal penentuan anggaran prioritas.

6. DAFTAR PUSTAKA

- Made, I., Ni G. (2019). Pengaruh Pengelolaan Keuangan daerah terhadap Akuntabilitas kinerja pada satuan kerja Perangkat Daerah Kabupaten Badung. *Jurnal Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, Voume 8*.
- Hani, Y., Rika H. S. (2015). Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada satuan kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Palembang. *Jurnal Manajemen dan Bisnis Sriwijaya, Volume 13*.
- Harbani, P. (2017). *Teori Administrasi Publik*. Bandung. Alfabeta.
- Ikram, M. (2022). *Administrasi Publik Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta. Tanah Air Beta.
- Kementerian Keuangan RI. (2006). *Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah*.
- Kementerian Keuangan RI. (2008). *Modul Peningkatan kapasitas Keunagan Daerah*.
- Kementerian Keuangan RI. (2020). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Kementerian Keuangan RI. (2016,). *Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 5 tahun 2016 tentang Susunan dan Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Boalemo*.
- Kementerian Keuangan RI. (2014). *Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*.
- Lakip. (2021). *Laporan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2021*.
- Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo No. 6 Tahun 2021. (2017). RPJMD 2017 – 2022 Kabupaten Boalemo
- <https://www.pustakaindo.co.id/pengertia-manajemen-keuangan-menurut-20/01/2020>
- <https://mjurnal.com/manajemen-keuangan-menurut-para-ahli>
- <https://www.pendidik.co.id/15-pengertian>
- <https://www.studinews.co.id/pengertian-akuntabilitas-menurut-para-ahli-03/04/2020>
- www.linguistikid.com/2016/09/pengertian-penelitian-deskriptif-kuantitatif